

PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENYULUHAN PERTANIAN (PERKEBUNAN) TERHADAP PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rusdi Hamadal¹⁾ Muhammad Adil²⁾

¹⁾Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
email : rusdihamadalsp@gmail.com

²⁾Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
email : muhammad.adil@unismuh.ac.id

Abstract

This research aims to find out the role and function of extension institutions on agricultural development (plantations) in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province and what obstacles in the extension and contribution of extension workers to agricultural development. This research was carried out in Bulukumba Regency using qualitative methods with data collection techniques through observation and interviews with farmers, agricultural extension workers and counseling in the Department of Food Crops, Horticulture and Plantation in Bulukumba Regency. The results of the study showed the role and fungsi of plantation agricultural counseling institutions towards agricultural development which includes as a service, central communication, central institutional development and central development of partnerships and functions of counseling institutions as planning and depreciation of programs, provision and dissemination of information, human resources development, administrative arrangement and evaluation functions have not been maximal. The lack of quantity and quality of agricultural extension workers (plantations), the lack of trainings attended by plantation extension workers, the policy of transitioning from extension workers to extension workers of food crops. Agricultural development (plantation) is also seen from economic growth, community welfare, and increasing plantation production. The decline in production in several commodities, namely cloves, rubber, cocoa and coffee based on data from the central statistics agency from bulukumba district year 2014 to 2017.

Keywords: Role and Function of Counseling Institutions, on Agricultural Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga penyuluhan terhadap pembangunan pertanian (perkebunan) di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan hambatan-hambatan apa yang dialami penyuluh dan kontribusi penyuluh terhadap pembangunan pertanian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan petani, penyuluh pertanian dan bidang penyuluhan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan peran dan fungsi lembaga penyuluhan pertanian perkebunan terhadap pembangunan pertanian yang meliputi sebagai Pelayanan, sentral komunikasi, sentral pengembangan kelembagaan dan sentral pengembangan kemitraan dan fungsi lembaga penyuluhan sebagai perencanaan dan penyusunan program, penyediaan dan penyebaran informasi, pengembangan SDM, penataan administrasi dan fungsi evaluasi belum maksimal. Minimnya kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian (perkebunan), kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti penyuluh perkebunan, adanya kebijakan peralihan dari penyuluh perkebunan ke penyuluh tanaman pangan. Pembangunan pertanian (perkebunan) juga dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan hasil produksi perkebunan. Menurunnya hasil produksi di beberapa komoditas yaitu cengkeh, karet, kakao dan kopi berdasarkan data badan pusat statistik sejak tahun kabupaten bulukumba 2014 sampai dengan 2017.

Kata Kunci : Peran dan Fungsi Lembaga Penyuluhan, terhadap Pembangunan Pertanian.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian yang merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan sebagai pengamalan Pancasila adalah seluruh upaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, sumber daya manusia, modal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menghasilkan produksi pertanian dan bahan baku primer industri. Sektor

pertanian dalam Repelita VI masih memiliki peranan strategis, yakni sebagai sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat petani, sebagai penghasil pangan bagi masyarakat, sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku bagi industri pengolahan, sebagai penyedia lapangan kerja dan lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, sebagai sumber penghasilan devisa negara, sebagai penghasil produk mata dagangan, serta sebagai salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan pertanian mencakup pembangunan tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hortikultura.

Kenyataan menunjukkan bahwa program-program pembangunan semakin sulit untuk menjangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak. Situasi ekonomi yang ada, infrastruktur, serta kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah seringkali mendorong petani-petani dengan lahan sempit secara ekonomi dan sosial. Selain penguasaan atas lahan pertanian yang sempit, nilai tukar pertanian yang rendah, kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong terpuruknya petani ke dalam kemiskinan.

Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Roucek dan Warren, 1984).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mendeskripsikan tugas tersebut dalam pasal 11 ayat 1 huruf c, yaitu: "memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah" dan pasal 13 ayat 1 Huruf e, yaitu: "menumbuh-kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha".

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan terdiri dari :

- Kelembagaan penyuluhan pemerintah
- Kelembagaan penyuluhan swasta
- Kelembagaan penyuluhan swadaya

Fauziah (2010) mengemukakan bahwa dalam pembangunan pertanian sumber daya alam, sumberdaya manusia teknologi dan kelembagaan merupakan empat faktor penggerak (four prime movers). Keempat faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (sufficient condition) untuk mencapai performance pembangunan yang dikehendaki, artinya apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan maka tujuan untuk mencapai 2 performance tertentu yang dikehendaki seperti produksi Perkebunan baik itu komoditi cengkeh, karet, lada, kopi, coklat dan lain-lain.

Perkebunan di kabupaten Bulukumba sangat berkembang pesat sehingga komoditi perkebunan yang mampu menjanjikan untuk pembangunan pertanian. Walaupun pada kenyataannya beberapa komoditi yang perlu di perlakukan khusus seperti cengkeh, kopi, karet dan kakao sebagai salah satu komoditi unggulan yang ada di kabupaten bulikumba diharapkan agar mampu menjaga stabilitas ekonomi petani. Tanaman perkebunan seperti cengkeh, kopi, karet dan kakao juga harus mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan pertanian di kabupaten Bulukumba. Untuk itu peran serta fungsi penyuluh pertanianlah yang harus di jalankan sebagai bentuk kinerjanya masing-masing yang telah diamanahkan oleh pemerintah lewat lembaga-lembaga penyuluhan pertanian (perkebunan).

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Tinjauan Hasil Penelitian

Dalam literatur klasik pembangunan pertanian karya Arthur Mosher yang berjudul "Getting Agriculture Moving" dijelaskan secara sederhana dan gamblang tentang syarat pokok dan syarat

pelancar dalam pembangunan pertanian. Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi: (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, (3) adanya perangsang produksi bagi petani, dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi: (1) pendidikan pembangunan, (2) kredit produksi, (3) kegiatan gotong royong petani, (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian. Beberapa Negara berkembang, termasuk Indonesia, mengikuti saran dan langkah kebijakan yang disarankan oleh Mosher.

b. Tinjauan Teori

1) Pengertian Peran

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat”.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah peran (role) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup. Juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisadiharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, menjalankan suatu peranan”. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94).

2) Pengertian Fungsi

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

3) Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan penyuluhan pertanian terdiri atas Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) pada tingkat provinsi, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) pada tingkat kabupaten/kota, dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) pada tingkat kecamatan. Mengenai kelembagaan tersebut pada tiap tingkatan akan diuraikan sebagai berikut:

a) Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)

Badan Koordinasi Penyuluhan atau dikenal dengan istilah Bakorluh merupakan lembaga daerah di tingkat provinsi pada bidang penyuluhan. Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyuluhan sesuai pasal 11 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006.

Sedangkan fungsi dari Bakorluh secara umum antara lain :

- Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor.
- Melakukan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan.
- Melakukan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan

- tinggi, dan sasaran penyuluhan.
- Penyusunan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional. (Departemen Pertanian, 2010).

b) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K)

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) merupakan lembaga daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati dan merupakan unsur pembantu Kepala Daerah. BP4K mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Pelaksanaan tugas tersebut oleh BP4K juga disertai dengan penyelenggaraan fungsi :

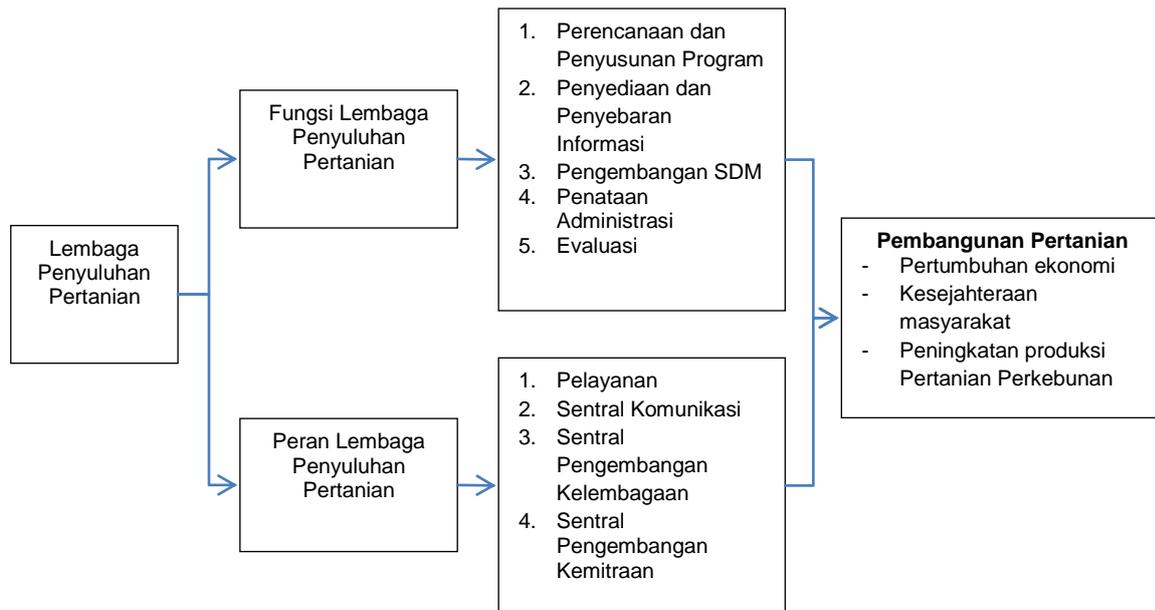
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya (Departemen Pertanian, 2010).

4) Pembangunan Pertanian

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Menurut Suhendra (2004) di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Para perancang pembangunan Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru menyadari benar hal tersebut, sehingga pembangunan jangka panjang dirancang secara bertahap. Pada tahap pertama, pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri penghasil sarana produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang pertanian (agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam. Rancangan pembangunan seperti demikian, diharapkan dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia yang serasi dan seimbang, tangguh menghadapi gejolak internal dan eksternal.

Menurut Arifin (2004) tidak berkembangnya sektor pertanian berakar pada terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri sejak pertengahan tahun 1980-an. Menyusul periode pertumbuhan tinggi sektor pertanian satu dekade sebelumnya, pemerintah seolah menganggap pembangunan pertanian dapat bergulir dengan sendirinya. Asumsi ini membuat pemerintah mengacuhkan pertanian dalam strategi pembangunannya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh paradigma pembangunan saat itu yang menekankan industrialisasi. Pemerintah mencurahkan perhatiannya pada sektor industri, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan proteksi yang sistematis. Akibatnya, proteksi besar-besaran ini telah merapuhkan basis pertanian pada tingkat petani.



Gambar Kerangka Pikir Kajian Peran Dan Fungsi Lembaga Penyuluhan Perkebunan Terhadap Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

3. METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Dan Fungsi Lembaga Penyuluhan Pertanian Terhadap Pembangunan Pertanian Di Desa Bahu Kec. Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan partisipasi orang tua ini.

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Bulukumba. Salah satu daerah yang berkembang pada sektor pertanian khususnya di sektor perkebunan. Namun perlu di perhatikan lebih serius lagi untuk menopang pembangunan pertanian perkebunan dalam hal ini kapas dan karet, oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari perhatian lembaga-lembaga penyuluhan. Oleh karena itulah daerah ini dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu mulai bulan juli sampai dengan Bulan Agustus 2019.

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2007:215). Obyek dari penelitian ini adalah peran dan fungsi lembaga penyuluhan pertanian (perkebunan) terhadap pembangunan pertanian di kabupaten Bulukumba.

Subjek Penelitian Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002:107).

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Oleh karena itu informan pada penelitian kali ini adalah lembaga penyuluhan pada instansi terkait dalam hal ini dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk dijadikan sebagai sumber data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan

fungsi suatu lembaga penyuluhan dalam mengembangkan pertanian terkhusus pada perkebunan di daerah tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. metode observasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

2) Wawancara/ Interview

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3) Metode Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis. di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pengelolaan data atau analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan. Karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikianrupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diinginkan dalam penelitian.

Pembangunan pertanian dilihat dari :

- Pertumbuhan
- Pertumbuhan ekonomi
- Kesejahteraan masyarakat atau petani
- Peningkatan produksi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identitas Responden

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian disusun berdasarkan urutan kebutuhan dalam penyusunan berdasarkan karakteristik tertentu yang mencakup, umur responden, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang pernah dilalui.

1) Umur

Secara matematis memang faktor usia tidak akan berpengaruh terhadap data yang diperoleh tetapi secara alami faktor usia akan mempengaruhi cara berfikir dan kinerjanya, baik itu cara berfikir logis hingga cara berfikir yang bersifat analisa terhadap suatu masalah.

Untuk melihat gambaran mengenai umur responden di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba. Keragaman responden berdasarkan umur atau usia dapat ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
30 – 35 tahun	2 Orang	%
36 – 40 tahun	3 Orang	%
41 – 50 tahun	4 Orang	%
Lebih dari 51 tahun	1 Orang	%
Total	10 Orang	%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik umur responden pada tabel 1 tersebut, menunjukkan bahwa responden yang berumur antara 30 – 35 tahun sebanyak 2 orang sedangkan, responden yang berumur antara 36 – 40 tahun sebanyak 3 orang, responden yang berumur antara 41 – 50 tahun sebanyak 4 orang dan responden yang berumur lebih dari 51 tahun sebanyak 1 orang dengan. Berdasarkan karakteristik umur responden sebagian besar responden berumur antara 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 4 orang.

2) Berdasarkan Jenis Kelamin

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	8 Orang	%
Perempuan	2 Orang	%
Total	10 orang	%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel 2 tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 8 orang sedangkan responden perempuan yaitu sebanyak 2 orang. Sebagian besar responden yang ada adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 8 orang.

3) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keragaman responden berdasarkan jenjang pendidikan dapat ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Strata Satu (S1)	7 orang	%
Strata Dua (S2)	3 orang	%
Total	10 orang	%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan karakteristik jenjang pendidikan yang pernah dilalui responden pada tabel 3 tersebut, terlihat bahwa responden yang telah melewati jenjang pendidikan pada strata satu (S1) sebanyak 7 orang sedangkan responden yang telah melewati jenjang pendidikan strata dua (S2) sebanyak 3 orang. Sebagian besar responden yang ada adalah responden yang telah menyelesaikan studi di strata dua (S2) yaitu sebanyak 6 orang. Responden yang berada di jenjang pendidikan Strata satu (S1) dan Strata dua (S2) adalah penyuluh dan pegawai bagian dan kepala-kepala seksi penyuluhan di dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

b. Pembahasan

1) Peran Lembaga Penyuluhan Pertanian Perkebunan di Kabupaten Bulukumba

Petani adalah pelaku utama dalam kegiatan pertanian serta bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu ditingkatkan kesejahteraan dan kecerdasannya, salah satu upaya peningkatan kecerdasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan. Dengan adanya penyuluh diharapkan semua informasi pertanian yang berkembang dapat diserap dan diterima oleh petani, semakin banyak informasi yang dimanfaatkan oleh petani maka semakin efektif penyuluhan tersebut. Subyek pembangunan pertanian adalah petani, masyarakat petani pada umumnya dan kelompok tani pada khususnya. Sebagai salah satu komponen dalam sistem agribisnis, maka peran penyuluh sangat menentukan keberhasilan penyuluhan (Ban, 1999: 267).

Penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan yang bersifat non-formal atau suatu sistem pendidikan di luar sistem persekolahan yang biasa, dimana orang ditunjukkan cara-cara mencapai

sesuatu dengan memuaskan sambil orang itu tetap mengerjakannya sendiri, jadi belajar dengan mengerjakan sendiri (Kartasapoetra, 1987 *dalam* Erwadi, 2012:8).

Sektor pertanian khususnya perkebunan sangat berperan penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia oleh karena itu semua elemen yang terlibat langsung dalam hal ini penyuluh harus berkontribusi penuh terhadap pembangunan pertanian.

Peran lembaga penyuluhan pertanian yang perlu di perhatikan untuk menjaga stabilitas produksi pertanian sebagai berikut:

a) Sebagai Pelayanan

Peran lembaga penyuluhan sebagai pelayanan kepada masyarakat petani terkhusus pada pertanian di sektor perkebunan di kabupaten bulukumba belum maksimal dilakukan oleh penyuluh pertanian sehingga terkadang sebagian dari petani perkebunan kurang mendapatkan pelayanan baik teknologi, informasi dan komunikasi. Petani juga sulit untuk melakukan inovasi-inovasi baru serta mandiri yang di topang dengan ilmunya dalam merawat lahan dan komoditi serta mengelolah hasil-hasil produksinya. Terutama pada tanaman kopi dan kakao dan karet. Peran penyuluh pertanian dari segi pelayanan di sektor perkebunan perlu untuk di maksimalkan. (Wawancara pada tgl 27 Juli 2019).

Hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Zaithmal, et.al.(2000:26) bahwa kualitas pelayanan yang baik akan adalah salah satu penentu keberhasilan pembangunan pertanian. Kualitas pelayanan di tentukan oleh lima dimensi, yaitu keuntungan, konsistensi, responsif, jaminan dan empati.

b) Sebagai Sentral Komunikasi

Lembaga penyuluhan pertanian memiliki peran sebagai sentral komunikasi yang menghubungkan komunikasi antara petani dengan pemerintah, petani dengan mitra kelembagaan kelompok tani, sehingga sumber informasi yang didapatkan petani harus jelas dan efektif antara petani dan lembaga penyuluhan.

Penyuluh pertanian dalam membangun komunikasi dengan petani belum efektif. Sehingga petani melakukan aktivitas usaha tani tidak lagi berkoordinasi dengan lembaga penyuluhan pertanian atau penyuluh yang di tugaskan disetiap kecamatan dan desa. Penyuluh yang telah ditugaskan terkadang tidak menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan informasi, memberikan pemahaman serta melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada penyuluh. Lembaga penyuluhan di kabupaten bulukumba masih kurang efektif untuk di sektor perkebunan. Oleh karena itu petani di sektor perkebunan melakukan aktivitas usahataniya tidak lagi membutuhkan penyuluh. Tidak efektifnya Komunikasi penyuluh kepada petani karena jumlah atau kuantitas penyuluh di sektor perkebunan semakin minim dengan adanya peralihan peran atau fungsinya. Sehingga penyuluh kesulitan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di petani. (hasil wawancara dengan pada tgl 28 Juli 2019).

Oleh Muhammad Badri. (2011). Tujuan komunikasi adalah tercapainya suatu pemahaman bersama antara dua atau lebih partisipan komunikasi terhadap suatu pesan (dalam hal ini adalah ide baru) melalui saluran komunikasi tertentu. Dalam komunikasi inovasi, proses komunikasi antara (misalnya penyuluh dan petani) tidak hanya berarti penyuluh menyampaikan inovasi atau jika sasaran telah menerima pesan tentang inovasi yang disampaikan penyuluh. Namun seringkali (seharusnya) komunikasi baru berhenti jika sasaran (prtani) telah memberikan tanggapan seperti yang dikehendaki penyuluh yaitu berupa menolak atau menerima inovasi tersebut.

Komunikasi memiliki peranan penting dalam menuju perubahan sosial sesuai dengan yang dikehendaki. Entah itu menggunakan tipe komunikasi khusus yang mengkomunikasikan inovasi-inovasi baru. (Rogers dan Shoemaker 1987).

c) Sebagai sentral Pengembangan Kelembagaan

Lembaga penyuluhan sebagai sentral pengembangan kelembagaan yang cukup memadai bagi pengembangan lembaga kelompok-kelompok tani agar terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan dalam mengasa skil dan ketrampilan untuk pengembangan usaha taninya, sebagai pusat pengembangan kelembagaan, penyuluh seharusnya lebih produktif untuk pengembangan di lembaga-lembaga petani agar mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang baik. Lembaga penyuluhan juga sebagai pengotrol baik itu pembiayaan organisasi maupun pada teknis lain yang berkaitan dengan kelembagaan petani.

Peran lembaga penyuluh pertanian sebagai sentral pengembangan kelembagaan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan petani untuk pengembangan kelembagaan dan

keberlangsungan kelompok-kelompok tani di sektor perkebunan. Terkadang kelompok tani hanya di posisikan sebagai alat untuk menjalankan aktivitas dan kepentingan pemerintah yang dalam artian jika ada kegiatan-kegiatan tertentu saja (wawancara pada tgl 2 Agustus).

d) Sebagai Sentral Pengembangan Kemitraan

Peran lembaga penyuluhan sebagai sentral pengembangan kemitraan tentu sangat strategis dalam hal pola pengembangan kemitraan anatar kelompok-kelompok tani dan pihak-pihak terkait yang saling menguntungkan demi menjaga komoditi dan hasil-hasil produksi.

Namun Peran ini tidak berjalan dengan baik oleh karena itu petani melakukan kemitraan tanpa melalui lembaga penyuluhan pertanian. Lebih banyaknya penyuluh pertanian yang fokus pada komoditi tanaman pangan dan hortikultura sehingga pertanian di sektor perkebunan tidak terlalu di perhatikan oleh penyuluh serta masih kurangnya pengetahuan maupun pada akses informasi dan komunikasi. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kabupaten bulukumba agar lebih memperhatikan peran-peran lembaga penyuluhan agar bekerja sesuai dengan perannya sebagai lembaga sentral pengembangan kemitraan kelembagaan di sektor perkebunan terutama memperhatikan pada sumber daya manusia dan kuantitas penyuluh itu sendiri. Faktor sumberdaya manusia serta alih fungsi penyuluh dari perkebunan ke penyuluh tanaman pangan dan hortikultura sehingga berdampak sistemik pada peran-peran lembaga penyuluh pertanian di sektor perkebunan. (hasil wawancara pada tgl 2 Agustus 2019).

Dari keterangan peran penyuluh pertanian di atas bahwa kebijakan peralihan peran penyuluh dari penyuluh perkebunan ke penyuluh tanaman pangan dan hortikultura yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja penyuluh pada sektor perkebunan.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah peran (role) dipilih secara baik karena diya menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup. Juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor aktor profesional.

Dalam memilih pola kemitraan di bidang perkebunan tentunya harus tetap sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan perkebunan yang berkaitan dengan kesempatan kerja, pemasokan bahan baku industri, peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan. Perlu juga di perhatikan kelemahan petani yang umumnya meliputi teknologi, modal, akses pasar, pengolahan hasil, SDM, kelembagaan dan produktivitas. (Junaedi 2010).

2) Fungsi Lembaga Penyuluhan Pertanian perkebunan di kabupaten Bulukumba

Fungsi lembaga penyuluhan sebagai Perencanaan dan Penyusunan Program, Penyediaan dan Penyebaran Informasi, Pengembangan SDM, penataan administrasi dan sebagai fungsi evaluasi. Fungsi lembaga penyuluhan ini yang seharusnya dijalankan oleh penyuluh dengan melakukan pelatihan atau sosialisasi dan bimbingan serta melakukan program penyuluhan. Memberikan informasi dan pelatihan dalam hal pengembangan sumberdaya manusia kepada kelompok tani maupun petani. Melakukan evaluasi kinerja untuk keberlangsungan aktivitas petani.

Aktivitas penyuluh dalam menjalankan fungsinya sebagai perencanaan dan penyusunan program, pengembangan sumberdaya manusia, penataan administrasi dan sebagai fungsi evaluasi ini hanya berjalan di beberapa kecamatan dan beberapa komoditi saja seperti kakao dan kopi belum seluruhnya penyuluh melakukan pendampingan kepada petani. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah jumlah penyuluh yang masih sangat kurang di sektor perkebunan. Sehingga terkadang penyuluh merasa kesulitan dalam menjangkau petani-petani yang ada pelosok pelosok desa terutama daerah pegunungan (wawancara pada tgl 6 Agustus 2019).

Menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Jumlah penyuluh perkebunan sampai tahun 2019 ini adalah berjumlah 8 orang dan belum ada penambahan atau rekrutmen tenaga kerja baru. Selain jumlah penyuluh yang berkurang disektor perkebunan juga masih kurang pemahaman dan minimnya pelatihan-pelatihan yang di dapatkan oleh penyuluh sebagai bentuk dari meningkatkan kapasitas keilmuannya yang di upgreet setiap saat. Penyuluh bertanggungjawab atas seluruh aktivitas petani dalam mengelolah lahan pertanian sampai pada hasilnya. Namun berbagai macam kendala yang dihadapi oleh penyuluh baik dari akses

informasi, komunikasi sampai pada fasilitas yang terkadang penyuluh perkebunan sulit untuk memberikan kegiatan penyuluhan kepada petani perkebunan. Aktivitas penyuluh yang maksimal akan menunjang kemajuan serta pembangunan pertanian khususnya di kabupaten Bulukumba. (wawancara pada tgl 6 agustus 2019).

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Pelaksanakan tugastersebut oleh BP4K juga disertai dengan penyelenggaraan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya (Departemen Pertanian, 2010).

Kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten di beberapa tahun terakhir ini lebih difokuskan pembangunan pertanian disektor tanaman pangan dan hortikultura. Itulah sebabnya penyuluh pertanian yang berada di sektor perkebunan sekarang di alihkan ke penyuluh tanaman pangan dan hortikultura. Dan serta kurangnya memainkan fungsi dari para penyuluh (Bapak Sudirman. Kepala Bagian lembaga Penyuluhan).

Adapun tugas penyuluh pertanian menurut kementerian pertanian Republik Indonesia sebagai berikut:

- a) Penyuluh sebagai inisiator, yang senantiasa selalu memberikan gagasan/ide-ide baru.
- b) Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan keluar/ kemudahan-kemudahan, baik dalam penyuluh/proses belajar mengajar, maupun fasilitas dalam memajukan usahatani. Dalam hal penyuluh penyuluh memfasilitasi dalam hal : kemitraan usaha, berakses ke pasar, permodalan dan sebagainya.
- c) Penyuluh sebagai motivator, penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau dan mampu.
- e) Penyuluh sebagai penghubung:
 - Penghubung dengan pemerintah, dalam hal ini :
 - Penyuluh sebagai penyampai aspirasi masyarakat tani (sebagai contoh dalam bentuk program penyuluhan pertanian)
 - penyuluh sebagai penyampai kebijakan dan peraturan-peraturanyang menyangkut kebijakan dan peraturan bidang pertanian.
- f) Penghubung dengan peneliti, dalam hal ini penyuluh senantiasa membawa inovasi baru hasil-hasil penelitian untuk dapat memajukan usaha tani.
- g) Penyuluh sebagai guru, pembimbing petani, yang senantiasa mengajar, melatih petani sebagai orang dewasa.
- h) Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator, yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar-mengajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi.
- i) Penyuluh sebagai penganalisa, penyuluh dituntut untuk mampu menganalisa masalah, sebab yang ada di usahatani dan di keluarga tani mampu menganalisa kebutuhan petani yang selanjutnya merupakan masukan dalam membuat program penyuluhan pertanian.
- j) Penyuluh sebagai agen perubahan, penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan. Dalam hal ini penyuluh berperan sebagai katalis, pembantu memecahkan masalah (solution gives), pembantu proses (process helper), dan sebagai sumber penghubung (resources linker).

Tujuan penyuluhan adalah untuk menimbulkan perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap dan motivasi petani terhadap kegiatan usahatani. Melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Penyuluh selaku fasilitator dan sekaligus sebagai motivator oleh petani harus dapat terbekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengenalan teknologi dan inovasi baru dalam memberikan informasi kepada petani agar dapat mengubah perilaku petani sehingga mau menerapkan informasi yang dibawakan dan disampaikan oleh penyuluh pertanian sebagai fasilitator. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan

informan diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan masih sangat minim dilakukan oleh penyuluh kepada petani perkebunan dalam hal merawat dan menjaga hasil produksi perkebunan.

3) Pembangunan Pertanian (Perkebunan) dan Hambatan yang di Alami Penyuluh di Kabupaten Bulukumba

Pembangunan pertanian yang merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan sebagai pengamalan Pancasila adalah seluruh upaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, sumber daya manusia, modal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menghasilkan produksi pertanian dan bahan baku primer industri.

Adapun indikator pembangunan pertanian di kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

a) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba ditahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015. Bahkan hingga 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bulukumba, mencatat perekonomian Kabupaten Bulukumba turun menjadi 5,05 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut terbilang cukup tinggi di tahun 2017 ini yang berada di angka 6,89 persen dan 6,77 persen ditahun 2016. Anjloknya pertumbuhan ekonomi terjadi disektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Meski demikian dalam PDRB pada tahun 2014 – 2017 seluruh sektor ekonomi mencatat pertumbuhan yang positif dalam pertumbuhan ekonomi sektor yang paling berkontribusi terhadap PDRB adalah sector pertanian.

Sektor yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan terkhusus di kabupaten bulukumba telah menempatkan beberapa komoditas unggulan perkebunan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat khususnya masyarakat petani di sektor perkebunan diukur dari peningkatan produksi hasil pertanian perkebunan. Oleh karena itu untuk menjaga kestabilan produk pertanian perkebunan di masa yang akan datang maka perlu ditingkatkan peran dan fungsi lembaga penyuluhan terutama sumber daya manusia penyuluh pertanian. (wawancara pada tgl 02 agustus 2019).

Karena pembangunan pertanian tidak terlepas dari kinerja serta partisipasi penyuluh yang mampu memberikan sumbangsi baik secara teori maupun pada teknisnya di lapangan kepada petani. Sehingga petani bekerja atas arahan dan bimbingan dari para penyuluh sebagai fasilitator. Agar masyarakat bisa mandiri dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan hasil-hasil produksi. Meningkatkan produksi perkebunan bergantung pada pola pemeliharaan yang intens apalagi komoditi seperti kakao dan kopi yang perlu di perhatikan lebih serius lagi. Komoditi kakao pernah mengali masalah dalam hal pemeliharaan yang tidak maksimal sehingga mengalami kerugian yang sangat besar pada tahun 2017.(wawancara pada tgl 2 agustus 2019).

c) Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 – 2017 dan data rekapitulasi perkebunan Sulawesi Selatan baik dari segi luas lahannya maupun pada produksi itu sendiri. Kontribusi penyuluhlah yang dibutuhkan dalam menjaga kestabilan hasil-hasil produk perkebunan diberbagai komoditi. Untuk mengetahui pembangunan pertanian ditinjau dari aspek produksi perkebunan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bisa di lihat pada tabel produksi berikut ini :

Tabel 4
Produksi Perkebunan Besar berdasarkan Jenis Tanaman di Kabupaten Bulukumba (ton),
2014 – 2017

No	Nama komoditi	2014	2015	2016	2017
1.	Karet	1.933 (Ton)	2.264 (Ton)	3.182 (Ton)	2 014,03 (Ton)
2.	Cengkeh	1.363 (Ton)	738.2 (Ton)	582 (Ton)	367,45 (Ton)
3.	Kopi	1.601 (Ton)	1630,7 (Ton)	247 (Ton)	1 442,55 (Ton)
4.	Kakao	4.881 (Ton)	4984,7 (Ton)	5.802 (Ton)	4 595,62 (Ton)

Sumber : Data Primer yang setelah di olah

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hasil produksi untuk komoditi karet secara keseluruhan di kabupaten bulukumba mengalami peningkatan produksi dari 2014 sampai 2016 tetapi

mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah produksi sebesar 2014,03 ton. Untuk komoditi cengkeh mengalami penurunan produksi dari 2015 sampai pada tahun 2017. Sementara untuk komoditi kopi mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah produksi keseluruhan 247 ton dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan jumlah produksi sebesar 1442,55 ton. Sedangkan untuk komoditi kakao meningkat produksinya dari tahun 2014 – 2016 dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2017 dengan jumlah produksi 4.595,62 ton.

Penurunan produksi ini tentu bukan menjadi prestasi bagi pemerintah dalam menjadikan sektor pertanian perkebunan sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi ini harus dievaluasi peran dan fungsi penyuluh di sektor perkebunan untuk lebih dimaksimalkan lagi. Pembangunan pertanian di kabupaten bulukumba menurun dari segi produktivitasnya terutama pada tanaman cengkeh, karet, kopi dan kakao. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar lebih memperhatikan pertanian di sektor perkebunan dengan beberapa komoditi unggulan seperti, cengkeh, karet, kakao, dan kopi. Komoditi ini yang menjadi komoditi unggulan Sulawesi Selatan.

Tidak stabil dan bahkan Menurunnya hasil produksi cengkeh, karet dan kopi sejak tahun 2014 - 2017 di kabupaten bulukumba yang tersebar di beberapa kecamatan di sebabkan sebagian lahan petani di perkebunan cengkeh ditanami kelapa dan komoditi lainnya. Sehingga lahannya semakin sempit dan mempengaruhi hasil produksi itu sendiri. (hasil wawancara pada tgl 04 agustus 2019). Sedangkan untuk komoditi kakao meningkat produksinya dari tahun 2014 – 2016 dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2017 di karenakan pada komoditi kakao saat itu terserang hama dan penyakit sehingga mengalami penurunan pada hasil produksi. (wawancara pada tgl 04 agustus 2019).

Komoditi perkebunan seperti kakao, cengkeh, karet, dan kopi yang berkembang saat ini di kabupaten bulukumba dan menjadi komoditi unggulan. Namun komoditi unggulan ini ada yang mengalami penurunan baik itu dari luas lahan maupun pada produksi itu sendiri sehingga pemerintah atau dalam hal ini dinas terkait harus lebih memperhatikan lagi komoditi-komoditi tersebut. Penyuluh pertanian harus lebih memperhatikan lagi petani yang ada di sektor perkebunan untuk kelangsungan serta meningkatkan pembangunan pertanian. Karena sebagian dari petani cengkeh dan karet lahannya di tanami kelapa sehingga lahannya semakin sempit dan ini sangat mempengaruhi produktivitas tanaman. (wawancara pada tgl 04 agustus).

Kontribusi lembaga penyuluhan pertanian yang sangat dibutuhkan oleh petani sehingga dapat membantu petani dalam melakukan pengelolaan usahatani sampai petani itu mandiri, karna kita tau bahwa tanaman perkebunan adalah tanaman tahunan sehingga dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk menjaganya. (hasil wawancara pada tgl 6 Agustus 2019).

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran lembaga penyuluhan dan lembaga-lembaga kelompok tani yang senantiasa bersinergi untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi baru terhadap kebutuhan petani dalam melakukan usahatani. Sehingga seharusnya tidak ada kesenjangan antara lembaga penyuluhan pertanian dan kelompok-kelompok tani khususnya di sektor perkebunan yang harus menjadi perhatian khusus terhadap menopang pembangunan pertanian di kabupaten bulukumba. Tidak meratanya peran dan fungsi lembaga penyuluhan pertanian dapat mempengaruhi hasil usahatani terutama di sektor perkebunan. Banyaknya penyuluh perkebunan yang di alihkan fungsinya ke penyuluh tanaman pangan dan hortikultura sehingga kuantitas penyuluh perkebunan semakin minim dan inilah menjadi masalah utama bagi penyuluh perkebunan sehingga tidak maksimalnya menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian perkebunan. (hasil wawancara pada tgl 6 agustus 2019).

Berdasarkan tabel produksi 2014 – 2017 serta data rekapitulasi perkebunan Sulawesi Selatan 2016 bahwa komoditi perkebunan seperti karet, cengkeh, kopi dan kakao yang menjadi komoditi unggulan Sulawesi Selatan yang berada di kabupaten bulukumba menunjukkan bahwa hasil produksi perkebunan tidak stabil dalam peningkatan produksi dari 2014 - 2017 baik itu komoditi karet, cengkeh, kopi maupun komoditi kakao. Meski demikian dalam PDRB Pada tahun 2014 – 2017 seluruh sektor ekonomi mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. dalam pertumbuhan ekonomi sector yang paling berkontribusi terhadap PDRB adalah sektor pertanian.

Dalam literatur klasik pembangunan pertanian karya Arthur Mosher yang berjudul “Getting Agriculture Moving” dijelaskan secara sederhana dan gamblang tentang syarat pokok dan syarat pelancar dalam pembangunan pertanian. Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi: (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya bahan-

bahan dan alat-alat produksi secara lokal, (3) adanya perangsang produksi bagi petani, dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

5. KESIMPULAN

- 1) Peran lembaga penyuluhan pertanian perkebunan di kabupaten belum berjalan maksimal, baik itu peran sebagai pelayanan, sentral komunikasi, sentral pengembangan kelembagaan dan sentral pengembangan kemitraan. Faktor utama yang menyebabkan tidak maksimalnya peran lembaga yang di laksanakan oleh penyuluh pertanian disebabkan karena banyak penyuluh perkebunan di alihkan ke penyuluh tanaman pangan dan hortikultura. Disisi lainnya adalah minimnya pengetahuan dan akses informasi yang di dapatkan penyuluh pertanian di sektor perkebunan.
- 2) Tidak berjalannya fungsi lembaga penyuluhan pertanian di sektor perkebunan, sehingga terkadang petani atau kelompok-kelompok tani kesulitan dalam hal pengembangan Sumberdaya manusia dalam mengelolah usahataniya. Fungsi lembaga penyuluhan pertanian diantaranya yaitu sebagai perencana dan penyusunan program, penyediaan dan penyebaran informasi, pengembangan sumberdaya manusia, penataan administrasi dan fungsi evaluasi.
- 3) Pembangunan pertanian sangat di tentukan oleh maksimalisasinya Peran serta fungsi lembaga penyuluhan pertanian (Perkebunan) khususnya di sektor komoditi perkebunan dalam hal ini komoditi cengkeh, kakao, karet dan kopi yang diakui sebagai salah satu komoditi unggulan di kabupaten bulukumba dan skala sulawesi selatan.

6. REFERENSI

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Albrecht, Hartmut et.al. 1989. *Agricultural Extension: Basic Concepts and Methods*. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). Eschborn.
- Anonim. 2019. Bulukumba Dalam Angka 2014 – 2017 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba 2019.
- Anonim. 2011. TeoriUtamaPembangunan. <http://sosialcorner.com/teori-utama-pembangunan>. [diakses tanggal 20 April 2018].
- Arifin, Bustanul. (2004). Refleksi dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia, Jurnal Agrimedia Institut Pertanian Bogor Vol4 (1), 6-10.
- Arikunto, Suharsimi. 2002 *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pertanian. 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung, Refika Aditama.
- Duverger, Maurice, 2010, *Sosiologi Politik, terjemahan Daniel Dhakidae*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fauziah, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Lnajutan*. Medan: Madenatera.
- Maran, Rafael Raga. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:Asdi Mahasatya.
- Mosher, Arthur T. 1991. *Getting Agriculture Moving*. Frederick A. Praeger, Inc. Publishers. New York.
- Suhendra, E.S. 2004. Analisis Struktur Sektor Pertanian Indonesia: Analisis Model Input-Output. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No. 2, Jilid 9, Tahun 2004: 55-65.
- Sugiyono, 2007. *Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, tentang kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.
- Warren dan Roucek. 1984. *Pengantar Sosiologi* (diterjemahkan: Sahat Simamora). PT. Bina Aksara. Jakarta.

Competitiveness

p-ISSN: 1978-3035 – e-ISSN: xxxx-xxxx

Vol. 8, Nomor 1 | Juli – Desember, 2019

Zainal, Nining Haslinda, 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai* pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar.